

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah tantangan serius yang telah menjadi fokus perhatian dunia selama bertahun-tahun. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan bukan sekadar kekurangan finansial, melainkan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hermawati, 2017 dalam Purwanti, 2024: 1). Kemiskinan merupakan suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum. Standar kehidupan minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok pangan dan hidup sehat yang didasarkan pada kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Sajogyo, 1987, dalam Hasibuan, Juanda, dan Mulatsih, 2019:80).

Permasalahan kemiskinan juga merupakan salah satu isu strategis di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 269,20 ribu, pada tahun 2022 sebesar 258,61 ribu, dan tahun 2023 sebesar 245,50 ribu. Persentasi penduduk miskin dari tahun 2021-2023 secara berturut-turut adalah 7,15%, 6,80%, dan 6,40. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bandung laju penurunannya masih sangat lambat meskipun perbaikan program penanggulangan kemiskinan telah pemerintah lakukan, namun pada kenyataannya masih belum sepenuhnya

mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari angka gini ratio Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan kemiskinan yang masih sangat lambat, berikut secara berturut-turut dari tahun 2020-2022 adalah 0,414, 0,386, dan 0,370 (BPS Kab. Bandung, 2023).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk miskin paling besar yakni 258,61 ribu, Kota Bandung 109,82 ribu dan Kabupaten Bandung Barat 183,67 ribu (BPS Kab. Bandung, 2023). Tingginya angka kemiskinan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jika melihat dari aspek jarak Kabupaten Bandung memiliki lokasi yang lebih dekat dengan Kota Bandung yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Masalah kemiskinan selalu menjadi perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi permasalahan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal di antaranya rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, minimnya layanan kesehatan, gizi anak, dan buruknya mutu layanan pendidikan. Keluarga miskin, dipandang sebagai warga yang mengalami masalah keberfungsian sosial, karena mereka tidak mampu melakukan tugas pokoknya dengan baik, yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan sosial merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multidimensional. Menurut Barrientos et al. (2005, dalam Sinaga et al, 2022:119) secara tradisional menyatakan bahwa: “Perlindungan sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jejaring pengaman sosial.” Sebagian besar literatur menekankan tujuan perlindungan sosial untuk (i) melindungi pendapatan dan konsumsi masyarakat disebabkan wabah penyakit, pengangguran atau kecacatan; (ii) memerangi kemiskinan dengan memastikan akses kepada kebutuhan pokok; dan (iii) meningkatkan peluang pendapatan individu dengan memberikan akses kredit/pembiayaan serta menciptakan pasar tenaga kerja (Robalino et al., 2012 dalam Sinaga et al, 2022:119).

Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu mulai tahun 2007 dan terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 tentang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai

Keluarga Penerima Manfaat PKH. Keluarga Penerima Layanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Keputusan.

Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi kehidupan secara mandiri. Peserta Program Keluarga Harapan merupakan orang miskin yang hidupnya di bawah rata-rata. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, maka program tersebut untuk membimbing warga miskin yang pendidikannya lemah dan standar kesehatannya tidak diperhatikan. Jadi Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat akan memberi dampak pada Keluarga Penerima Manfaat tersebut.

Program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu bentuk dari program perlindungan sosial non-kontributif dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan lapangan kerja melalui berbagai mekanisme yang berhubungan satu sama lain. Dampaknya dapat terlihat pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat mikro yaitu pada level individu atau rumah tangga, tingkat meso yaitu ekonomi lokal dan komunitas, hingga tingkat agregat (Alderman dan Yemtsov, 2012 dalam Helly Ocktilia et al, 2023:45).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawardani et al (2020:11) yang berjudul “Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado.” Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh PKH. Dampak positif yang dihasilkan yaitu 1) mengurangnya beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin, serta mengurangi beban mereka dalam hal mengakses pendidikan bagi anaknya di tingkat SD, SMP, dan SMA. 2) Meningkatkan partisipasi pemeriksaan kesehatan anak balita dan kesejahteraan sosial untuk memastikan pemberian asupan gizi untuk lansia dan disabilitas. Adapun dampak negatif yang dihasilkan adalah adanya ketergantungan dari penerima manfaat terhadap bantuan yang diberikan (Setyawardani, 2020:13).

Alderman dan Yemtsov (2012: 11-16) mengemukakan bahwa dampak program perlindungan sosial memiliki dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah kemampuannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan serta konsumsi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, program tersebut juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Perlindungan sosial juga dapat meningkatkan akses pendidikan dengan mengurangi hambatan keuangan yang seringkali menjadi kendala dalam mengakses pendidikan. Program ini juga berperan dalam mengurangi ketimpangan dengan cara menyalurkan bantuan kepada kelompok-kelompok yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program perlindungan

sosial bukan hanya memberikan jaringan pengaman bagi masyarakat rentan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Alderman (2012:10-15), mengemukakan dampak negatif program perlindungan sosial dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Salah satunya adalah menciptakan disinsentif untuk bekerja, di mana penerima bantuan mungkin merasa tidak perlu bekerja karena telah menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan ketergantungan pada bantuan, membuat penerima bantuan sulit untuk mandiri karena kurangnya insentif untuk keluar dari kemiskinan. Biaya yang tinggi juga menjadi masalah, menguras anggaran pemerintah karena membutuhkan dana besar untuk membiayai bantuan tersebut. Penyalahgunaan dana juga merupakan risiko, terutama karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas, serta potensi korupsi. Akibatnya, penerima bantuan juga mungkin mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat karena pandangan negatif terhadap orang miskin dan anggapan bahwa mereka malas dan tidak mau bekerja.

Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. "Program" apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto,2009:3 dalam Munthe, 2015:5).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmiyati (2018:234) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimanfaatkan oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan esensial, seperti pembelian peralatan sekolah, pakaian seragam, dan sebagian kecil disisihkan sebagai tabungan untuk kebutuhan di sekolah. Bagi peserta PKH yang memiliki anak balita, bantuan ini digunakan untuk meningkatkan asupan gizi mereka, seperti pembelian susu dan tambahan makanan bergizi. PKH memberikan dampak positif yang signifikan di bidang pendidikan, dengan membantu meningkatkan prestasi anak di sekolah, sekaligus memperhatikan kesehatan mereka melalui peningkatan asupan gizi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2023:196) di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa PKH memberikan dampak positif yaitu pemenuhan kebutuhan sekolah dibidang pendidikan serta layanan posyandu yang diterima masyarakat dibidang kesehatan dalam pemenuhan gizi anak.

Orang selalu dihadapkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, keberfungsian sosial juga mengacu kepada cara-cara yang digunakan oleh individu maupun kolektivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dwi Heru Sukoco (2021:42) untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan manusia, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kebutuhan manusia pada prinsipnya bersifat jamak, artinya kebutuhan manusia adalah lebih dari satu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan sekumpulan dari kebutuhan dasarnya.
2. Ada beberapa kebutuhan manusia yang sebenarnya merupakan karakteristik dari konteks kebudayaan yang dimilikinya. Manusia yang berada di dalam masyarakat tertentu, akan dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaannya.
3. Sistem kebutuhan setiap individu sangat tergantung dari perkembangannya. Kebutuhan seorang bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia akan berbeda-beda macamnya. Selain perkembangan fisik, maka perkembangan psikis, mental, sosial, spiritual, dan intelektual juga akan mempengaruhi jenis kebutuhan yang diperlukan.

Narwoko dan Suyanto (2004), keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu Narwoko & Suyanto, 2004 dalam Nuroniyah (2023:3).

Asih Kuswardinah (2017:26-30) mengemukakan bahwa:

Kebutuhan keluarga merupakan suatu kebutuhan lembaga keluarga, yang jika terpenuhi maka kondisi keluarga akan menjadi keluarga yang nyaman, aman dan dapat dinikmati dengan baik oleh setiap anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan aman dan nyaman akan terkondisi jika pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya terjamin. Secara kasat mata kebutuhan keluarga akan terlihat terpenuhi jika dalam sebuah keluarga telah tercukupi secara wajar dalam hal: makan, pakaian, perumahan, keuangan, pendidikan, hiburan, taman bergaul.

Syarifuddin (2016:101) mengemukakan bahwa:

Intensitas kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu : 1) Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting untuk di penuhi guna memelihara kelangsungan hidup, meliputi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, 2) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua sebagai pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan liburan, alat elektronik, dan perabotan rumah tangga, 3) Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga sebagai pelengkapan kehidupan manusia yang pemenuhannya dapat di hindarkan. Kebutuhan tersier bersifat prestise meliputi kebutuhan akan barang mewah seperti alat transportasi, alat komunikasi dan perhiasan.

Peneliti menyimpulkan bahwa kebutuhan keluarga merupakan segala sesuatu yang harus terpenuhi dan yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup, 3 kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Salah satu tujuan akhir dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, tentunya program ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan dari hasil penjajagan dan wawancara awal pada tanggal 1 februari dan 7 februari 2024 yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pendamping PKH di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu, terdapat beberapa masalah terkait kurangnya pemahaman KPM tentang pentingnya memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program, serta masalah administrasi yang menghambat distribusi bantuan secara tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada Program Keluarga Harapan (PKH) terutama terkait dampaknya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya

mengalami permasalahan sosial, seperti kemiskinan. PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, keberhasilan dan efektivitas program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan KPM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak konkret yang dirasakan oleh KPM yang sebelumnya berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Desa Tenjolaya dipilih berdasarkan hasil konsultasi peneliti dengan pejabat kecamatan setempat, yang mana lokasi penelitian ini sebagai daerah pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana PKH mempengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga di lingkungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas PKH dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga KPM PKH di Desa Tenjolaya serta daerah-daerah sejenisnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Program Keluarga Harapan Pada Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung?” Selanjutnya, untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan tersebut, penulis

menjabarkan serta merincikan permasalahan tersebut kedalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan primer pada KPM PKH Desa Tenjolaya?
2. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan sekunder pada KPM PKH Desa Tenjolaya?
3. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan tersier pada KPM PKH Desa Tenjolaya?
4. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk dapat menggambarkan terkait “Dampak Program Keluarga Harapan Pada Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat, (KPM) di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung” Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan primer pada KPM PKH Desa Tenjolaya.
2. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan sekunder pada KPM PKH Desa Tenjolaya.
3. Untuk mengetahui dampak Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan kebutuhan tersier pada KPM PKH Desa Tenjolaya.

4. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan kontribusi dan menambah wawasan dan pengembangan keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan dan pemberian layanan sosial terkait dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktik berupa sumbangan pemikiran, ide-ide, maupun solusi mengenai: penelitian di bidang pekerjaan sosial yang mana dapat memberikan pemahaman mengenai dampak PKH pada pemenuhan kebutuhan KPM di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang memberikan konteks dan pemahaman tentang mengapa penelitian ini penting dilakukan. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian secara jelas mengidentifikasi pertanyaan atau isu yang akan diteliti. Tujuan penelitian menguraikan hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi

potensialnya terhadap pengetahuan atau praktik. Sistematika penulisan menggambarkan struktur dan urutan bagian-bagian yang akan disajikan dalam laporan penelitian.

Bab II Kajian Konseptual, memuat tentang bagian yang merangkum penelitian terdahulu terkait dengan topik yang sedang diteliti, menguraikan konsep-konsep yang relevan, dan membangun kerangka pemikiran yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, memuat tentang desain penelitian yang akan digunakan, penjelasan mendalam tentang latar belakang penelitian, sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang dipilih, langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data, teknik analisis data yang akan diterapkan, serta jadwal dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang gambaran terkait lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V Usulan Program, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, memuat tentang kesimpulan dan saran penelitian.